

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sarana komunikasi antara aktivitas perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Berdasarkan PSAK (2009) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Manajemen Laba merupakan tindakan kecil dari *fraud* (Puspatri snanti, 2014). Manajemen laba timbul sebagai dampak persoalan keagenan yaitu ketidakselarasan kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan yang dikarenakan adanya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi akibat adanya ketidakseimbangan informasi yang diperoleh dan diketahui antara pemegang saham dan manajemen, dimana manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak eksternal. Asimetri informasi antara manajemen dan pemilik memberikan kesempatan bagi manajer untuk bertindak mementingkan keuntungan pribadi. Menurut Healy dan Wahlen's (1999) manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dan struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan baik untuk menyesatkan interpretasi beberapa *stakeholder* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi kontrak yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkan pada laporan keuangan. Karena itu manajer perusahaan seringkali melakukan manajemen laba dengan berbagai cara guna merebut hati para investor.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam Laporan Kinerja tahun 2016 mengungkapkan bahwa industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto nasional ialah perusahaan-perusahaan industri pengolahan (manufaktur) yaitu sebesar 20.51% (Kemenperin, 2017). "Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang aktivitasnya mengolah bahan baku menjadi produk jadi" (Bahri, 2016).

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sendiri dikelompokkan dalam tiga sektor yaitu industri dasar dan kimia, aneka industri, dan industri barang konsumsi. Perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan bahan kimia sendiri cenderung memiliki risiko kecurangan lebih besar dibandingkan jenis perusahaan manufaktur lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Arens dkk (2015) bahwa bahan kimia merupakan jenis persediaan yang sulit untuk diamati dan dinilai karena keberagamannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud mengambil sektor industri dasar dan kimia sebagai objek penelitian. Pemilihan sektor ini selain karena alasan di atas juga didasarkan pada fakta bahwa industri dasar dan kimia

merupakan sektor yang mendominasi jumlah keseluruhan perusahaan di industri manufaktur sehingga, penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi analisis kecurangan dengan sektor yang lebih spesifik namun, tetap memiliki jumlah sampel mencukupi. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, setiap tahunnya jumlah perusahaan manufaktur terbanyak memang berada pada sektor industri dasar dan kimia.

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Berdasarkan Sektor

Sektor	Jumlah Perusahaan				
	2012	2013	2014	2015	2016
Industri Dasar dan Kimia	61	62	66	65	66
Aneka Industri	39	40	40	41	41
Industri Barang	36	37	38	37	37
Total	136	139	144	143	144

Sumber: *sahamok.com*, 2019

Menurut *ACFE* (2016) sendiri, kecurangan yang menyebabkan kerugian terbesar di dunia pada 2016 ialah kecurangan atas penyajian laporan keuangan. Kerugian atas jenis kecurangan tersebut mencapai 75% kerugian dari total median loss walau kasusnya hanya 10% dari 2.410 total kasus kecurangan yang ada (*ACFE*, 2016).

Salah satu kecurangan pelaporan keuangan di dunia yang terungkap pada 2015 ialah skandal *Toshiba Corporation* (Toshiba). Toshiba merupakan perusahaan manufaktur listrik atau elektronik terdiversifikasi berlokasi di Minato, Shibaura, Tokyo, Jepang, yang memproduksi berbagai komponen perangkat elektronik, televisi, hingga sistem pembangkit tenaga nuklir (Reuters, 2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan toshiba : terungkap dengan adanya tekanan bahwa para eksekutif Toshiba telah menekan unit bisnis perusahaan untuk mencapai target laba yang realistis (Simbolon, 2015); kesempatan, rasionalisasi, dan arogansi bahwa toshiba memiliki budaya perusahaan dimana keputusan manajemen tidak bisa ditentang (Sukmana, 2015); dan kemampuan yang dapat dilihat melalui terungkapnya fakta bahwa tiga direksi telah berperan aktif dalam menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar Rp. 15,85 Triliun sejak tahun 2008.

Selain skandal Toshiba, kasus kecurangan pada perusahaan-perusahaan kimia. *Noria Corporation* (2017) mengungkapkan bahwa 37% perusahaan dalam industri kimia mengalami berbagai jenis kecurangan. *Tianhe Chemicals*, perusahaan manufaktur kimia Hong Kong, pada 2014 dituding menyampaikan kepada investor bahwa pendapatan mereka tumbuh lebih dari 20% per tahun, sementara mengajukan dokumen ke regulator yang menunjukkan pendapatan dan laba jauh lebih rendah (Riley, 2014).

Melihat peristiwa yang telah terjadi, penelitian mengenai kecurangan pelaporan keuangan menarik untuk diteliti. Di era modernisasi ini, negara-negara di dunia perlu menerapkan suatu sistem yang harus dikelola dengan baik, yang sering disebut pula dengan *Good Corporate Governance*. Dengan adanya sistem tata kelola perusahaan yang baik, maka suatu negara diharapkan dapat mengatasi krisis keuangan maupun non keuangan yang akan terjadi. Seiring dengan berkembangnya pula isu *corporate governance*, maka sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola bisnis suatu perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Good corporate governance sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. *Good corporate governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri dan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer (El Gammal dan Showeiry, 2012).

Berdasarkan definisi dari *corporate governance* tersebut, maka peran tata kelola perusahaan sangat diperlukan untuk mencegah dan menghalangi manajer melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Tata kelola perusahaan yang buruk dapat mengakibatkan terjadinya *fraud* seperti yang terjadi di beberapa perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, kualitas dari *corporate governance* perlu ditingkatkan agar manajer tidak melakukan penyimpangan terhadap para pemangku kepentingan. Menurut Razali dan Arshad (2014), ada beberapa indikator dalam mengukur kualitas *corporate governance* antara lain: (1) ukuran dewan komisaris, (2) komposisi dewan komisaris independen, (3) komite audit, dan (4) efektivitas audit internal.

Banyaknya terjadinya kecurangan laporan keuangan karena lemahnya *corporate governance* dalam perusahaan. Menurut Skousen dkk (2009) insiden kecurangan tertinggi yaitu pada perusahaan dengan sistem *corporate governance* perusahaan yang lemah. Jansen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk

mengurangi konflik keagenan salah satunya adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan.

Melalui kepemilikan Institusional sebagai anak perusahaan yang umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan bisa mengawasi dan mengevaluasi kinerja perusahaan secara efektif karena memiliki cukup banyak saham (*majority investors*) untuk mengubah manajemen dan kemudian mengendalikan perusahaan dengan baik dan benar (Cornett et al., 2006).

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan (FCGI, 2001). Jumlah dewan komisaris yang semakin banyak dalam suatu perusahaan maka pengendalian internal perusahaan tersebut akan semakin baik sehingga kecenderungan manajer untuk melakukan kecurangan laporan keuangan berkurang.

Keberadaan komite audit independen diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balance*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (IKAI, 2012). Tugas utama dari komite audit pada prinsipnya membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan.

Berbagai Informasi yang telah penulis ungkapkan diatas, merupakan bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut maka, penulis bermaksud menyusun penelitian dengan judul Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Variabel *Corporate Governance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri dasar dan Kimia periode 2016-2018).

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Apakah *Corporate Governance* dapat digunakan sebagai pendeteksian kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2016-2018 ?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. Untuk mengetahui apakah variabel *Corporate Governance* dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2016-2018.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut .

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan memperluas wawasan serta pengetahuan tentang bukti empiris mengenai *corporate governance* terhadap kecurangan laporan keuangan.

2. Bagi Akademisi

Hasil dan penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan dan refrensi untuk penelitian sejenisnya serta untuk penelitian selanjutnya.

